P**ENGEMBANGAN MODEL PELATIHAN DESAIN KERAJINAN BERBASIS KREATIVITAS LOKAL BAGI TKI PURNA DI KAWASAN SELATAN JAWA TIMUR UNTUK MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI KREATIF**

Salah satu persoalan yang timbul di kawasan pedesaan adalah keterbatasan lapangan kerja di luar sektor agraris. Kondisi tersebut berimbas pada keterbatasan peluang kerja bagi para TKI purna, yang sebagian besar tidak memiliki ketrampilan formal. Remitansi dan ketercukupan finansial tidak mampu memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik pasca menjadi TKI. Penguatan dan bekal ketrampilan yang memadahi pasca menjadi TKI dapat dijadikan sumber ekonomi alternatif bagi para TKI purna dan keluarganya. Pengembangan desain kerajinan dapat dijadikan rujukan pengayaan ketrampilan bagi para TKI purna. Penelitian ini bertujuan memberikan model pelatihan desain kerajinan bagi para TKI purna di kawasan selatan Jawa Timur dengan berpijak pada kreativitas lokal, sehingga bekal ketrampilan yang diberikan lebih membumi dan sesuai dengan konteks lokalitas. Penelitian ini dirancang dalam 2 tahap. Pada tahap I penelitian ini dilakukan pemetaan dan kajian kecenderungan ketrampilan yang dimiliki para TKI purna yang untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam pengembangan model pelatihan yang sesuai dengan konteks ketrampilan dasar para TKI, pada tahap II penelitian ini dilakukan pengembangan prototype model pelatihan desain kerajinan yang diikuti dengan uji coba lapangan terbatas. Penelitian tahap I menggunakan rancangan deskriptif kualitatif dengan metode analisis isi (*Content analisis*) baik secara kualitatif dan kuantitatif terhadap karakter desain kerajinan dan ketrampilan dasar yang dimiliki para TKI purna. Pada tahap II digunakan rancangan pengembangan prosedural yang diadaptasi dari Borg dan Gall (1983) dan rancangan model prosedural yang dikembangkan oleh McKenny (2001) untuk menghasilkan prototype model pelatihan desain kerajinan bagi para TKI purna dalam bentuk buku panduan pelatihan dan di lakukan coba lapangan terbatas. Langkah-langkah pengembangan meliputi: (1) evaluasi oleh tim penilai, (2) evaluasi oleh ahli media, (3) evaluasi aspek isi oleh ahli isi (ahli kajian budaya, ahli teknologi, dan ahli bahasa) dan aspek visual, dan (4) uji coba lapangan yang terbatas.

Sektor kerajinan merupakan salah satu sub sektor dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Kerajinan pada umumnya merupakan sektor non formal, sehingga tidak mensyaratkan bekal pendidikan formal yang ketat. Para TKI pada umumnya berasal dari berbagai macam latar pendidikan, sehingga tidak terdapat hambatan edukatif untuk menekuni sektor tersebut. Pengembangan pelatihan ketrampilan kerajinan bagi para TKI purna merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup TKI purna dan keluarganya, mengingat sebagian besar remitansi selama menjadi TKI digunakan untuk membayar hutang dan membeli barang-barang konsumtif (Bank Indonesia, 2008).

Pengembangan pelatihan kewirausahaan di sektor kerajinan dapat dilakukan dengan baik bagi para TKI purna mengingat setiap TKI resmi yang telah diberangkatkan telah mendapat latihan kewirausahaan dari BNP2TKI. Program pelatihan kewirausahaan yang telah dilakukan merupakan upaya penguatan mental ketrampilan kewirausahaa bagi TKI, sehingga akan memiliki sikap positif untuk berwira usaha pasca menjadi TKI. Persoalan yang mengemuka dalam beberapa kasus pelatihan kewirausahaan adalah pilihan sektor usaha yang akan ditekuni pasca menjadi TKI. Sektor usaha yang lebih banyak dipilih adalah adalah sektor pengembangan ketrampilan (Tavi, 2010). Ketrampilan kerajinan menjadi pilihan utama dalam sesi pelatihan kewirausahaan, mengingat sektor tersebut tidak memerlukan penyertaan modal ketrampilan dan finansial yang terlampau besar.

Pilihan-pilihan jenis ketrampilan kerajinan akan menentukan keberhasilan pengembangan program yang hendak dilakukan. Kerajinan yang spesifik dan berpijak pada kreativitas lokal dapat dijadikan model pengembangan ketrampilan yang sesuai untuk para TKI purna, mengingat para TKI memiliki latar belakang sosial ekonomi dan tingkat pendidikan yang cederung beragam.

Penelitian ini merupakan penelitian rintisan untuk menemukan model pengembangan pelatihan desain kerajinan yang sesuai dengan karakter para TKI, dengan berpijak pada kreativitas lokal. Pilihan pada kreativitas lokal sebagai basis pengembangan desain mengingat kerajinan merupakan produk ketrampilan yang spesifik, sehingga memerlukan keunikan agar dapat diterima pasar dengan baik.

Para TKI merupakan pribadi yang unik sehingga dibutuhkan model pelatihan yang sesuai dengan karakter para TKI.

**Tenaga Kerja**

Tenaga kerja (*manpower*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja(berusia

15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Pada era sebelum tahun 2000 patokan minimal tenaga kerja adalahmereka yang berusia diatas 10 tahun. Namun sejak Sensus Penduduk 2000 dan sesuai dengan ketentuan internasional, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih.

Dari publikasi Sensus Penduduk 2000 terdapat informasi mengenai penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Berdasarkan sensus tahun 2000 jumlah tenaga kerja Indonesia yang berusia diatas 15 tahun mencapai 139.991.800 orang. Data tentang jumlah penduduk serta komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal, dan pekerjaan penting diketahui terutama untuk mengembangkan perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, sosial, politik,maupun lingkungan sosial budaya. yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia.

Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja di suatu negara. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu yang termasuk angkatan kerja dan yang termasuk bukan angkatan kerja. Penggolongan usia kerja di Indonesia mengikuti standar internasional yaitu usia

15 tahun atau lebih. Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang terakhir itulah yang dinamakan sebagai pengangguran terbuka. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, ibu rumah tangga, pensiunan dan lain-lain.

Pembahasan mengenai ketenagakerjaan ini menarik karena beberapa alasan. Pertama, dapat melihat berapa besar jumlah penduduk yang bekerja*.* Kedua dapat mengetahui jumlah pengangguran dan pencari

kerja. Ketiga, apabila dilihat dari segi pendidikan maka hal ini akan mencerminkan kualitas tenaga kerja.Keempat, dilihat dari statusnya dapat terlihat berapa jumlah penduduk, yang bekerja di sektor formal yang jaminan sosialnya

baik, dan berapa yang bekerja di sektor informal. Kelima, pengetahuan tentang karakteristik dan kualitas tenaga kerja akan berguna sebagai dasar pengembangan kebijakan ketenagakerjaan, terutama pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas SDM yang akan dapat meminimalkan jumlah pengangguran di suatu negara. Hal ini penting karena tingginya angka pengangguran akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi masyarakat misalnya meningkatnya kriminalitas.

Terkait dengan hal ini, diperlukan indikator-indikator yang mampu menggambarkan keadaan angkatan kerja dan tenaga kerja untuk selanjutnya dijabarkan sebagai dasar penentuan arah kebijakan ketenagakerjaan. Indikator- indikator ini antara lain tenaga kerja, angka partisipasi angkatan kerja (APAK) menurut kelompok umur , tingkat pengangguran terbuka, tingkat setengah pengangguran, APAK menurut lapangan usaha, APAK menurut status pekerjaan dan APAK menurut tingkat pendidikan. Dari besaran indikator-indikator tersebut dapat diketahui keadaan ketegakerjaan saat ini dan hal-hal yang memerlukan perbaikan di masa depan.

**METODE PENELITIAN Rancangan penelitian**

Rancangan penelitian yang digunakan pada tahun pertama menggunakan rancangan penelitian pengembangan model prosedural. Model prosedural merupakan adalah model yang bersifat deskriptif, yaitu menggariskan langkah- langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk (Univesitas Negeri Malang, 2003: 37). Model prosedural yang dipilih mengadaptasi dari model penelitian pengembangan (*research and development)* Borg dan Gall dan rancangan model prosedural model Mc Kenny (2001) yang pada intinya memiliki

2 tujuan utama, yaitu 1) mengembangkan produk, dan 2) menguji keefektifan produk dalam mencapai tujuan (Borg dan Gall, 1983:772).

Rancangan pada penelitian ini merupakan modifikasi dari langkah penelitian dan pengembangan dari Borg dan Gall maupun langkah penelitian pengembangan Mc Kenny (2001), kemudian dimodifikasi menjadi 2 langkah. Dua langkah

tersebut meliputi (1) tahap studi pendahuluan sebagai *need and contens analysis*, dan (2) tahap pengembangan sebagai *design, development,* dan *evaluation stages* **Subjek penelitian**

Subjek penelitian ialah para TKI purna di kawasan selatan Jawa Timur.

**Sumber Data**

Sejalan dengan subjek penelitian, sumber data penelitian ini ialah para TKI purna di kawasan selatan Jawa Timur, para perajin di kedua kawasan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat, BNP2TKI, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

**Data Penelitian**

Data penelitian dalam penelitian ini meliputi kuantifikasi para TKI purna dan jenis ketrampilan yang telah diperoleh; serta data kecenderungan karakter lokal pada karya-karya kerajinan di kawasan Selatan Jawa Timur.

Pada tahapan pengembangan diperoleh dari hasil uji/evaluasi. Jenis data pada tahapan pengembangan terdiri atas data kuantitatif dan data kualitatif.

1) Data kuantitatif berupa data verbal yang diperoleh dari skor jawaban yang dipilih evaluator dalam angket skala likert. Dari hasil perhitungan nilai rata- rata angket skala likert akan diperoleh rerata skor jawaban.

2) Data kualitatif diperoleh dari jawaban angket terbuka terhadap draf produk berupa hasil uraian deskriptif kritik dan saran-saran evaluator, serta hasil rekaman dari diskusi terfokus.

**Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini data dikumpulkan melalui 3 metode. Pengumpulan data kualitatif, yaitu : wawancara mendalam, pengamatan langsung atau observasi dan studi atau kajian dokumentasi.

1) Wawancara mendalam.

Teknik wawancara mendalam dilakukan untuk memahami pandangan para TKI purna terhadap ketrampilan kerajinan yang telah dihasilkan, baik menyangkut struktur visual yang ada ataupun kecenderungan estetika yang anut.

3) Pengamatan langsung atau observasi

Pengamatan langsung atau observasi terutama dipakai untuk melihat

perilaku dan keberadaan manusia dalam hubungan-hubungan sosial budaya yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh TKI purna.

4) Dokumentasi.

Proses dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis atau dokumen-dokumen dari instansi terkait yaitu profil karya kerajinan di kawasan selatan Jawa Timur.

**Instrumen Penelitian**

Pada tahap I penelitian bertujuan melakukan analisis isi, instrumen penelitian yang digunakan pada tahap tersebut meliputi pedoman wawancara, catatan observasi dan studi dokumentasi.

Pada tahap II yang merupakan tahapan perancangan, pengembangan, dan evaluasi, Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa angket terbuka, angket skala likert, dan format catatan diskusi terfokus.

1) Angket terbuka digunakan untuk mengumpulkan data tentang deskriptif kritik dan saran-saran para ahli setelah mengamati produk yang dikembangkan, berupa kolom lembar baris kosong untuk diisi komentar, saran, dan kritik.

2) Angket skala likert digunakan untuk mengumpulkan data tentang evaluasi dari ahli setelah mengamati produk yang dikembangkan, berupa kriteria jawaban: baik/layak/jelas/mudah/ tepat/sesuai, cukup baik/cukup layak/cukup jelas/cukup mudah/cukup tepat/cukup sesuai, kurang baik/kurang layak/kurang jelas/kurang mudah/kurang tepat/kurang sesuai, tidak baik/tidak layak/tidak jelas/tidak mudah/tidak tepat/tidak sesuai.

3) Format catatan observasi digunakan untuk mengumpulkan data hasil telaah tim peneliti melalui diskusi terfokus, berupa kolom lembar baris kosong untuk diisi sesuai hasil rekaman diskusi.

Instrumen tersebut dikembangkan sendiri oleh tim peneliti. Validasi instrumen dilakukan dengan menggunakan validitas konstruk (*Construct Validity*) atau uji rasional dengan cara menjabarkan konsep yang dibuat peneliti dalam variabel dan sub variabel dalam bentuk matrik berdasarkan kajian teori.

**Penganalisisan Data**

Pada tahap pertama yang merupakan penelitian analisis isi (*Content analysis*), penganalisisan data kualitatif mengunakan analisis sosiologis dan analisis kebudayaan. Pada penelitian ini dilakukan adaptasi dan pemaduan seperlunya. Pemakaiannya tampak pada langkah-langkah analisis data berikut: (1) penelaahan dan reduksi data, (2) Pengidentifikasi dan pengunitan data, (3) pengkategorian dan penggolongan data, dan (4) penafsiran dan penjelasan makna

data.

Pada tahapan pengembangan (tahap II) data hasil evaluasi melalui angket skala likert akan dianalisis menggunakan teknik analisis rata-rata. Sedangkan data hasil angket terbuka dan rekaman diskusi terfokus akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis rata-rata data hasil evaluasi

menggunakan rumus:

Σ*x*

X =

*n*

Keterangan :

*x* = nilai rata-rata

Σ*x* = jumlah skor jawaban evaluator

*n* = jumlah evaluator

Kriteria tingkat nilai rata-rata evaluasi sebagai berikut:

**Kriteria nilai rata-rata evaluasi Draf Produk Pengembangan**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rata-Rata** | **Kriteria** |
| 3,2 - 4 | Baik |
| 2,2 - 3,1 | Cukup Baik |
| 1,2 - 2,1 | Kurang Baik |
| 0 - 1,1 | Tidak Baik |

(Adaptasi dari Arikunto,2006)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Demografi dan Permasalahan para TKI**

Pada bagian ini akan diuraikan tentang kondisi demografi provinsi Jawa Timur yang berimplikasi pada peningkatan jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja. Keberadaan para Tenaga Kerja Indonedia merupakan salah satu implikasi dari jumlah penduduk yang besar yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja.

**Bonus Demografi Provinsi Jawa Timur**

Jawa timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami bonus demografi. Bonus demografi merupakan kondisi dimana jumlah pendudukan dalam usia produktif (15-64 tahun) mendominasi populasi nasional. Bonus demografi menjadi dasar umtuk meningkatkan produktivitas dan memicu pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan Sumber Daya Manusia. Bonus demografi dapat terjadi bila tingkat fertilitas turun, pertumbuhan pendapatan per

kapita untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk usia anak-anak dapat dialihkan untuk peningkatan mutu manusia sebagai modal pembangunan. Pada gilirannya bonus demografi akan menjadi *window oppurtunity* bila didukung oleh sumber daya manusia yang memadahi.

Penduduk jawa Timur pada tahun 2012 mencapai 38.950 jiwa. Jumlah tersebut meunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di provinsi ini merupakan tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2010, laju pertumbuhan pendudukan di provinsi Jawa Timur mencapai 35.550,4 jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan menghasilkan masalah ketenagakerjaan di banyak provinsi. Penyediaan lapangan kerja tidak berbanding lurus dengan laju pertumbuhan penduduk. Persoalan ketenagakerjaan tidak semata-mata berhubungan dengan ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya daya saing SDM, terutama pada pekerjaan disektor formal. Faktor kondisi eksternal seperti situasi ekonomi dunia dan faktor perubahan sosial budaya juga memberi kontribusi jumlah pengangguran di Jawa

Timur, diantaranya masih sedikit angkatan kerja yang berorientasi untuk berwirausaha.

Di sisi lain dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) prioritas ke-3 Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014 terdapat target program Perluasan Lapangan Kerja, yang diarahkan untuk mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di sektor informal maupun formal, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan menciptakan fleksibilitas pasar kerja dalam kondisi hubungan industrial yang kondusif diimbangi dengan penyediaan lapangan kerjauntuk penduduk dalam usia produktif akan meningkatkan kuantitas TPT (tingkat pengangguran terbuka). Data dari Dinas ketenagakerjaan menyebutkan angka 28.586.928 sebagai penduduk usia kerja di Jawa Timur, dengan jumlah 19.081.995 orang yang telah bekerja.

. Berdasarkan angka proyeksi BPS Prov. Jawa Timur, pada tahun 2012 penduduk Jawa Timur mencapai 38.052.950 jiwa, terdiri dari laki-laki 18.740.054 jiwa (49,25%) dan perempuan 19.312.896 jiwa (50,75%). Kondisi bulan Agustus

2012, BPS Prov. Jawa Timur melansir Penduduk Usia Kerja (penduduk 15 tahun ke atas) berjumlah 28.586.928 orang, dengan komposisi angkatan kerjanya sebesar 69,62% (TPAK). Dari angkatan kerja yang ada, penduduk yang bekerja

95,88%, sedangkan pencari kerja yang tidak/belum terserap di pasar kerja atau

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) sebesar 4,12%.

Pada kasus di Jawa Timur penurunan angka TPT masih didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian menyerap 59% tenaga kerja di wilayah pedesaaan, sedangkan di wilayah perkotaan didominasi oleh sektor perdagangan, jasa dan industri. BPS juga mencatat terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yg bekerja di sektor formal terutama pada sektor Industri, Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi dan Sektor Lainnya yang terdiri dari Sektor Pertambangan, Listrik, Gas dan Air, Konstruksi, Keuangan.

Tabel 4.2 kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur 2009-2011

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **2009** |  | **2010** |  | **2011** |  |
| **Februari** | **Agustus** | **Februari** | **Agustus** | **Februari** | **Agustus** |
| Angkatan  Kerja | 20.316.773 | 20.338.568 | 20.623.490 | 19.567.051 | 20.251.672 | 19.761.886 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bekerja | 19.123.221 | 19.305.056 | 19.611.540 | 18.738.108 | 19.406.025 | 18.940.340 |
| Penganggur | 1.193.552 | 1.033.512 | 1.011.950 | 828.943 | 845.647 | 821.546 |
| TPT | 5.87 % | 5.08 % | 4.91 % | 4.25 % | 4.18 % | 4.16 % |

Program penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPK) di provinsi Jawa Timur didorong oleh beberapa program pemerintah. Disnakertran provinsi Jawa Timur mengungkapkan bahwa penurunan TPK beberapa diantaranya didorong oleh program kebijakan pemerintah, diantaranya melalui mekanisme AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), AKL (Antar Kerja Lokal) AKAN (Antar Kerja Antar Negara), pengiriman transmigrasi dan tenaga kerja kontrak (Disnakertrans, 2012). Program peningkatan kompetensi kerja, kegiatan harmonisasi pengusaha-pekerja dan perbaikan sistem pengupahan (UMK) dan syarat kerja serta penegakkan

aturan (*law enforcement*) norma-norma kerja menjadi fokus program penunjang upaya pengurangan pengangguran di Jatim. Tercatat di tahun 2011, penempatan tenaga kerja dari sektor ketenagakerjaan sebanyak 327.489 orang (183.95%).dari target sebanyak 188.000 orang (Sugiri, 2012).

**Tenaga Kerja Indonesia di Jawa Timur**

Kasus ketenagakerjaan di Provinsi Jawa timur sebagian besar berhubungan kualitas sumber daya manusia yang ada. Isyu utama ketenagakerjaan di Jawa Timur berkaitan dengan 2 hal utama, yaitu 1) pengangguran dan 2) perlindungan pekerja. Pengangguran yang utama disebabakn orlh kualitas SDM yang rendah, kesem,patan bekerja di sektor formal yang masih terbatas, pemulangan TKI yang bermasalah, dan faktor sosial budaya tentang kecenderungan jenis pekerjaan yang dinilai lebi baik. Perlindang pekerja belum mendapat perhatian yang

serius.Kondisi tersebut lebih banyak terjadi pada sektor kerja industrial.

Tenaga kerja yang dominan di Jawa Timur sebagian besar berpendidikan Sekolah Dasar. Pada tahun 2012 sekitar 53,94% angkatan kerja di Jawa Timur berpendidikan Sekolah Dasar ke bawah. Kondisi tersebut yang turut memicu tumbuhnya kantong-kantong tenaga kerja Indonesia (TKI) di berbagai wilayah di Jawa Timur.

Program AKAN (Antar Kerja Antar Negara) menduduki tempat ke ke 2 terbanyak setelah program tenaga kerja lokal (20,3 %). Program AKAN

merupakan program pengentasan kemiskinan melalui mekanisme penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri melalui sistem Antar Kerja Antar Negara (AKAN) merupakan kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses rekrut, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.

Fungsi penempatan TKI ke luar negeri tidak terlepas dari fungsi perlindungannya, yakni untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.Tabel 4.4 menunjukkan sistem AKAN terdiri dari 4 kelompok dengan jumlah terbesar pada PPTKIS Embarkasi Bandara Juanda sebesar 68%.

Pemerintah provinsi Jawa timur telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka TPK. Program-prgram yang dilakukan diantaranya:

1) Perluasan dan penempatan tenaga kerja, yang dilakukan melalui perluasan informasi lowongan kerja, penempatan tenaga kerja ke luar negeri, dan Perluasan kesempatan kerja di sektor informal.

2) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja,yag dilakukan melalui reposisi UPT Pelatihan kerja, implementasi pelatihan yang kurikulumny aberorientasi dunia kerja dan Pembangunan TUK (Tempat Uji Kompetensi) dan PTC (*Production Training Center*) di 16 UPT Pelatihan Kerja.

3) Pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja, melalui Optimalisasi tugas dan fungsi Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Ketenagakerjaan guna pelaksanaan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara komprehensif , Optimalisasi tugas dan fungsi Satgas Pembinaan TKI untuk mengurangi pengiriman, TKI ilegal serta peningkatan pelayanan dan profesionalisme Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).

4) Hubungan Industrial dan Perbaikan Syarat Kerja, melalui Optimalisasi Tim

Unit Reaksi Cepat (URC) dan Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan

Masalah Hub. Industrial untuk menangani dan mencegah permasalahan perselisihan hubungan industrial secara cepat, tepat dan tidak berdampak. URC berkoordinasi dengan pegawai teknis dan Pemerintah Daerah setempat sesuai prosedur dan kewenangan masing-masing. Pembentukan URC juga bertujuan untuk memasyarakatkan pelaksanaan hubungan industrial dan peraturan Perundangundangan, dan di bidang ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan. Upaya penyusunan Upah Minimun Sektoral Kab./Kota (UMSK) di Jawa Timur

Berkaitan dengan permasalah tenaga kerja Indonesia, pemerintah provonsi melalui disnakertrans telah mengambil beberapa kebijakan yang berorientasi pada pengurangan kuantitas TKI disektor non formal dan dan menciptakan program- program penigkatan kualitas para TKI. Secara umum problematika dalam

program TKI sebanyak 70% disumbang dari pra bekerja antara lain dari rendahnya latar belakang pendidikan, kemampuan bahasa, ketrampilan kerja, kesiapan mental, administrasi status kependudukan, minimnya informasi kebutuhan di luar negeri, profesionalisme PPTKIS dan pelaksanaan pelatihan di BLKLN. Sedangkan pada saat selama bekerja dan pasca bekerja, permasalahan yang menonjol dari aspek minimnya monitoring dan perlindungan TKI di negara tujuan, lambatnya penyelesaian klaim asuransi, mekanisme perlindungan dan transportasi kepulangan serta penggunaan uang remitansi yang tidak diarahkan untuk kegiatan-kegiatan produktif

**Permasalahan TKI**

PermasalahanTKI yang ada di Indonesia pada umumnya terkait dengan 3 hal utama, yaitu permasalahan ketika pra bekerja, pada saat bekerja dan ketika selesai enjadi TKI. Berkaitan dengan persoalan pra bekerja, sistem AKAN (Antar Kerja Antar Negara) digunakan sebagai media pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Prosesnya dilakukan mulai rekrut, pengurus dokumen kependudukan, kesehatan, pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.

Pada 2 (dua) tahun terakhir, penempatan TKI asal Jawa Timur pada jenis jabatan informal masih lebih dominan dibandingkan jabatan formal. Di tahun

2011 penempatan TKI pada jenis jabatan jabatan formal sebesar 30,11% dan jabatan informal 69,89%. Sementara di tahun 2012 penempatan TKI pada jabatan formal naik menjadi 30,85% dan jabatan informal turun menjadi 69,15%*.* Jabatan sektor informal di tahun 2012 terbanyak bekerja di Hongkong sebanyak 21.934 orang (32,25%), Taiwan sebanyak 12.273 orang (10,05%) dan Malaysia sebanyak

3.175 orang (4,67%). Jabatan informal terbanyak masih diisi oleh TKI wanita (68,71%) yang mengisi sektor lapangan usaha jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan pada jabatan Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di kawasan Asia sebanyak 64,77%. Berdasar negara tujuan bekerja, sumbangan penempatan TKI asal Jawa Timur terbanyak bekerja di Hongkong sebanyak 21.934 orang

(32,20%), Taiwan sebanyak 12.273 orang (10,05%) dan Malaysia sebanyak 3.175 orang (4,67%).

Di tahun 2012, terjadi peningkatan jumlah penempatan TKI yang bekerja di sektor formal sebesar 0,74% dari 30,11% di tahun 2011 menjadi 30,85% di tahun

2012. Sumbangan penempatan sektor formal dengan tujuan negara-negara Arab di tahun 2012 mengalami kenaikan sebanyak 1.833 orang (108,27%) dibanding

tahun 2011. Dengan demikian kebijakan moratorium khusus penempatan TKI informal tujuan negara Arab telah berhasil menekan permasalahan, juga meningkatkan peluang pengisian pekerjaan di sektor formal. Peningkatan pengisian pekerja formal di tahun 2012 juga disumbang oleh makin banyaknya negara-negara di luar negara langganan penempatan terbanyak TKI asal Jawa Timur (seperti Hongkong, Taiwan dan Malaysia). Pekerjaan di sektor formal yang dapat diisi oleh TKI asal Jawa Timur antara lain pekerja di sektor konstruksi, perhotelan, bidan, *baby sitter*, perawat jompo, perusahaan berbadan hukum, dan lain-lain. Sementara itu, besarnya penempatan TKI di sektor informal asal Jawa Timur terkait tingkat pendidikan dan kualifikasi calon TKI/TKI yang pada umumnya masih didominasi oleh lulusan SLTP, serta masih tingginya permintaan dari negara tujuan/pengguna terutama pasar Asia. Secara bertahap sampai dengan tahun 2014 melalui peningkatan kualitas PPTKIS, Balai Latihan Kerja Luar

Negeri (BLKLN), UPT Pelatihan Kerja bertaraf internasional dan penggunaan

Sisko KTKLN, diharapkan Jawa Timur mampu meningkatkan penempatan TKI melalui kegiatan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) dengan perbandingan 60% untuk jabatan formal dan 40% untuk jabatan nonformal yang terampil.

Secara keseluruan di tahun 2012 jumlah penempatan TKI asal Jawa Timur mengalami penurunan sebanyak 8.667 orang (8,27%). Turunnya penempatan tenaga kerja ke luar negeri secara keseluruhan tersebut antara lain dikarenakan adanya pergeseran orientasi dalam bekerja di luar negeri, pengetatan pengiriman TKI ke luar negeri dalam bentuk pemberlakuan moratorium TKI khususnya sektor *domestic worker* ke 51 beberapa negara penempatan, juga adanya upaya pembenahan dalam pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang dilakukan Pemerintah melalui sistem komputer (Sisko KTKLN). Selain itu, pembenahan

juga dilakukan dengan memperketat penerbitan sertifikasi uji kompetensi calon TKI mengingat sertifikasi kelulusan TKI dan penunjukan petugas PPTKIS yang telah mendapat bimbingan teknis dan memilik ID Card yang bisa mengakses dan mengirim data calon TKI dalam Sisko KTLKN serta pembinaan manajemen cabang PPTKIS. Penurunan penempatan TKI asal Jawa Timur sebagai dampak dari kondisi eksternal, kebijakan moratorium dan pengetatan aturan terlihat pada pengirim TKI asal Jatim dari embarkasi non Juanda yang turun sebanyak 8.562 orang (26,11%).

Di sisi lain, naiknya angka penempatan TKI asal Jawa Timur embarkasi juanda berdampak pada naiknya nilai penerimaan remitansi sebesar 10,88% dibandingkan penerimaan di tahun sebelumnya. Selama periode tahun 2011 -

2012, kontribusi penerimaan remitansi TKI terbanyak berasal dari Hongkong, diikuti Taiwan dan Singapura. Menurut Bank Indonesia di Surabaya, penerimaan remitansi melalui bank tercatat sebesar 20%, sedangkan 80% selebihnya kembali melalui prosedur nonformal (dibawa oleh kerabat, dibawa sendiri oleh TKI yang bersangkutan, dan sebagainya). Secara umum, komposisi penggunaan remitansi TKI adalah 70% untuk keluarga TKI (bagi TKI formal), 80% untuk keluarga TKI (bagi TKI informal), dan antara 20%-30% sisanya untuk biaya hidup TKI. Negara tujuan penempatan TKI asal Jatim di tahun 2012 terbanyak masih ditempati oleh Hongkong, Taiwan dan Malaysia. Namun dari segi remitansi, kontribusi pengiriman TKI dari Singapura mengalahkan posisi Malaysia.

Besarnya penempatan TKI asal Jawa Timur di Hongkong tidak terlepas dari makin kondusifnya kerjasama antara Pemerintah Indonesia, Konjen Indonesia di Hong Kong, PPTKIS Indonesia, Asosiasi PPTKIS Hong Kong (APPIH) beserta anggotanya (agen pengerah tenaga kerja setempat), juga kontribusi PLRT Indonesia dan tentunya pihak pengguna TKI di Hong Kong. Selain itu, juga

karena intensitas dan kontinuitas upaya marketing, komunikasi, koordinasi, bimbingan dan monitoring oleh pihak-pihak terkait di Indonesia maupun Hongkong mulai pra-pemberangkatan, selama penempatan, hingga pasca penempatan, serta regulasi negara setempat terhadap jaminan perlindungan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Hongkong.

Terkait pemanfaatan remitansi, Disnakertransduk Prov. Jawa Timur mengeluarkan kebijakan untuk mengarahkan pemanfaatannya pada kegiatan produktif berupa aktivitas usaha mandiri yang pada akhirnya mampu menggerakkan sektor ekonomi di daerah asal TKI. Bimbingan penggunaan remitansi untuk kegiatan produktif, Disnakertransduk Prov. Jatim telah bekerjasama dengan pihak perbankan untuk memberikan dampingan sosialisasi dalam kegiatan PAP (Persiapan Akhir Pemberangkatan) TKI.

Di samping itu, agar penggunaan remitansi secara produktif pasca bekerja, dilakukan pembinaan kewirausahaan dan pembentukan Koperasi TKI Purna Tugas di daerah-daerah yang menjadi kantongkantong pengiriman TKI. Hingga tahun 2012, di Jawa Timur telah dibentuk 27 Koperasi TKI Purna Tugas dengan total anggota 1.489 orang.

**Ketrampilan TKI Purna**

Beberapa pihak sudah melakukan upaya penguatan ketrampilan bagi para TKI purna. Proses tersebut sebagian besar dijalankan oleh pihak BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia). Pihak BNP2TKI pada umumnya melakukan pembinan dengan penguatan bekal ketrampilan pada saat sebelum dan setelah pemberangkatan.

Bekal ketrampilanyang diberikan pihak BNP2TKI merupakan aktivitas yang berhubungan dengan penyiapan ketrampilan para calon TKI yangdisesuiakan dengan lingkup kerjanya. Pada banyak kasus pelatihan ketrampilan bagi para TKI

lebih banyak dilakukan sebelum masa keberangkatan. Pelatihan dilakukan oleh pihak BLK setempat.

Pelatihan atau bekal ketrampilan yang yang diberikan kepada para TKI purna relatif terbatas. TKI purna pada umumnya tidak memiliki keterikatan secara kuat dibandingkan dengan masa sebelum keberangkatan. Berkenaan dengan hal tersebut pihak pemeritah melalui kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah membentuk beberapa koperasi sebagai wahana untuk menampung para TKI

Purna.

Koperasi TKI purna pada awalnya diperuntukkan sebagai media pengendali keuangan para TKI. Pendirian koperasi yang melayani para TKI purna diharpkan mampu menampung modal produktif TKI. Pemerintah, dalam hal ini gubernur Jawa Timur telah mencanangkan beberapa program yangberkaitan dengan pengelolaan dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

Arah kebijakan Gubernur Jawa Timur dalam program penempatan TKI dilakukan melalui upaya peningkatan profesionalisme, memanusiakan TKI sebagai manusia yang bermartabat, dan melaksanakan perlindungan secara optimal. Arah kebijakan tersebut bertujuan untuk :

1. Penempatan TKI di sektor formal lebih besar dari pada penempatan TKI

infomal.

2. Pengurangan TKI ilegal (*zerro* TKI Ilegal).

3. Penggunaan *remmitance* TKI sebagai modal produktif melalui pengembangan koperasi TKI dan dampingan keuangan untuk TKI dan keluarga TKI.

4. Meningkatkan kerjasama kelembagaan dengan Dinas Kab/Kota, KBRI, Kemnakertrans, BNP2TKI dan *stakeholder* lainnya untuk peningkatan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.

Terkait pemanfaatan remitansi, Disnakertransduk Prov. Jawa Timur mengeluarkan kebijakan untuk mengarahkan pemanfaatannya pada kegiatan produktif berupa aktivitas usaha mandiri yang pada akhirnya mampu menggerakkan sektor ekonomi di daerah asal TKI. Bimbingan penggunaan remitansi untuk kegiatan produktif, Disnakertransduk Prov. Jatim telah bekerjasama dengan pihak perbankan untuk memberikan dampingan sosialisasi

dalam kegiatan PAP (Persiapan Akhir Pemberangkatan) TKI. Di samping itu, agar penggunaan remitansi secara produktif pasca bekerja, dilakukan pembinaan kewirausahaan dan pembentukan Koperasi TKI Purna Tugas di daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong pengiriman TKI. Hingga tahun 2012, di Jawa Timur telah dibentuk 27 Koperasi TKI Purna Tugas dengan total anggota 1.489 orang

**Hasil Pengembangan Modul Panduan**

Modul pengembangan kerajinan berbasis kreativitas lokal diperuntukkan bagi para fasilitator dan para peserta (TKI Purna). Modul tersebut disusun dalam

2 bagian utama , yaitu bagian petunjuk penggunaan modul dan bagian yang berisi materi ajar yang akan diberikan kepada peserta dan hal ikhwal tentang teknis pelaksanaan pelatihan yang saling terkait satu dengan yang lain. Secara umum modul yang dimasud terdiri dari komponen petunjuk , bagian teknis pelaksanaan pelatihan, dan sisipan informasi tambahan Secara sistemtis modul tersebut dapat dipecaha dalam 3 komponen utama, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian penutup.

1) Sampul depan bagian luar.

Sampul depan dibuat dalam format A4 dengan ketebalam 120 mm. Bagian sampil depan (cover) berisikan judul modul, ilustrasi, keterangan pengarang, dan tahun pembuatan modul. Ilustrasi cover terdiri dari 2 komponen. Huruf untuk halaman judul terdiri dari huruf jenis Arial dengan ukuran 53 dengan warna hitam dan Merah dan huruf Cambria dengan ukuran 26. Warna dasar cokat . Huruf untuk keterangan pengarang menggunakan tipe Cambria dengan ukuran 14 dengan warna hitam

2) Cover depan bagian dalam (back cover).

Sampul depan bagian dalam memuat teks judul buku, tim penyusun, desain dan *lay out*, ilustrator, hak cipta, penerbit, dan atas dukungan. Secara fisik sampul depan bagian dalam ini menggunakan *baground* bidang persegi warna putih

3) Daftar isi.

Daftar isi memuat daftar judul bab, sub-bab, dan halaman tiap bab atau sub- bab.

**KESIMPULAN**

Bonus demografi yang dialami provinsi Jawa Timur dengan indikator jumlah penduduk yang terus bertambah dengan tidak diimbangi peningkatan kuantitas lapangan kerja menyebabkan banyak masyarakat yang memilih sebagai tenaga kerja di luar negeri. Di provinsi Jawa Timur terdapat 5 kabupaten dominan yang mengirimkan tenaga kerja keluar negeri, yaitu Kab. Malang , Kab, Blitar, Kab. Ponorogo, kab Tulungagung dan Kab. Banyuwangi dengan tujuan utama negara-negara asia pasific yaitu Hongkong, Taiwan dan Malysia.

Pengirim tenaga kerja keluar negeri tersebut berdampak pada peningkatan kualitas ekonomi pada keluarga yang ditinggalkan. Data dari Dinas Ketenagakerja Provinsi jawa Timur menunjukkan bahwa remitansi TKI mengalami peningkatam setiap tahunnya. Perputaran ekonomi semasa menjadi TKI tersebut pada beberapa kasus tidak dapat berjalan berkesinambungan.Beberapa model pendampingan dilakukan oleh berbagai pihak untuk mendorong kemandirian pada TKI selepas pulang ke tanah air. Program- program yang lazim dilakukan adalah penguatan pengetahuan pada sektor ketrampilan.

Produk pengembangan pada penelitian ini adalah modul pelatihan pengembangan kerajinan berbasis kreativitas lokal. Modul tersebut dibuat berdasarkan kondisi para TKI purna yang membutuhkan program pendampingan secara berkesinambungan. Modul pengembangan ini disusun dalam 3 bagian utama, yaitu bagian pengantar, bagian isi dan bagian pengayaan bacaan.

Modul pengembangan tersebut diharpkan dapat digunakan secara mandiri oleh beberapa fasilitator. Kondisi tersebut dilandasi oleh kenyataan bahwa keberadaan para TKI tersebar hampir diseluruh kabupaten dan kota di jawa Timur.

Berdasarkan hasil penyusunan dan telaah tim ahli terhadap draf panduan yang dikembangkan berisi tiga komponen pokok yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Sistematika bagian awal terdiri atas: 1) sampul depan bagian luar dan sampul depan bagian dalam, 2) pengantar dan petunjuk penggunaan modul,

3) daftar isi. Bagian isi modul atas 3 bagian , yaitu: 1) Pembukaan, Perkenalan dan Orientasi Belajar, 2) Memahami Karakter Kerajinan dan 3) Rencana Tindak Lanjut dan Evaluasi. Bagian akhir panduan memuat bahan bacaan dan daftar pustaka.

Berdasarkan segi fisik, draf model panduan yang dikembangkan mencakup pertimbangan aspek panataan artistik dan pertimbangan aspek tipologi gambar. *Pertama*, aspek penataan artistik dapat diuraikan: (1) *lay out* buku ditata dengan menggunakan unsur-unsur teks, warna, gambar, dan *baground* dengan gaya semi formal; (2) keserasian unsur ditata dengan memilih warna senada dan bergradasi, teks huruf dipilih jenis areal, gambar dibuat dengan karakter realis sederhana, dan *baground* dipilih warna pasta agar kontras-harmonis dengan teks; (3) kesatuan unsur diperoleh dengan memberi *baground* dan ilustrasi pendukung teks serta mengatur spasi yang agak rapat; (4) daya tarik dilakukan dengan pemilihan warna yang beda atau kontras pada teks maupun tampilan tiap bagian; dan (5) proporsi unsur dilakukan dengan menentukan ukuran font, besar gambar, dan perbandingan luas bidang teks.

**DAFTAR PUSTAKA**

Buku Penuntun Jabatan (panduan Memilih Pekerjaan), Depnaker Jakarta Tahun

1998

Disnakertransduk Provinsi Jatim . 2012. *Buku Informasi dan profil Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan Kependudukan Jawa Timur*. Disnakertransduk Prov. Jatim t

Hary Soegiri. 2012. *Kondisi Ketenagakerjaan di Jawa Timur Kondusif, Dorong Penciptaan Peluang* **Kerja.** Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Vol.3, No. 1, April 2012, 113-122.

Industri Smelter akan dibangun di Jatim, Bepprov-Jatimprov.go.id (03 Agustus

2012)

Kumpulan Materi Workshop Pengembangan Masterplan Percepatan dan peluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Bappenas RI 2012

Rencana Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, Disnakertransduk Prov. Jatim tahun 2009Studi Tentang Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Sektoral, Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kemenakertrans RI Tahun 2012